

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK NO. 23 TAHUN 2002
(Studi Kasus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

Anita Putri

NIM. C91216144



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anita Putri
NIM : C91216144
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Anita Putri
NIM. C91216144

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anita Putri NIM C91216144 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimonaqosahkan

Surabaya, 02 Maret 2020

Pembimbing,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

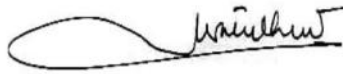
Nip. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anita Putri NIM. C91216144 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

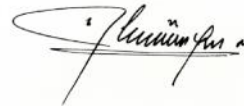
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II



Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III



Suyikno, S.Ag, M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, M.H
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 28 Juli 2020

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANITA PUTRI
NIM : C91216144
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : anitaputri25m@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002 (STUDI KASUS DI
SEKOLAH INKLUSIF GALUH HANDAYANI SURABAYA)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2020

Penulis

(ANITA PUTRI)

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menyebutkan bahwa *”Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”*

Salah satu sekolah yang sudah berstandar inklusif di Surabaya ialah Sekolah Galuh Handayani Surabaya. Sekolah yang beralamat di Jalam Manyar Sambongan No 87-89, Surabaya-Jawa Timur. Peneliti memilih sekolah ini karna sekolah ini merupakan sekolah inklusi pertama yang ada di Surabaya. Sekolah ini tidak hanya melayani satu jenjang pendidikan saja, tetapi ada 4 jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan College. Alasan pertama berdirinya sekolah ini ialah karna keprihatinan seorang guru terhadap murid-murid yang mempunyai keterlambatan dan perbedaan dengan murid-murid normal lainnya, yang menyebabkan tindakan bullying sehingga membuat para murid dengan berkebutuhan khusus itu malas untuk ke sekolah. Adapun visi dari sekolah itu ialah *”Turut serta berpartisipasi membangun negara melalui pendidikan bagi penerus bangsa tanpa diskriminasi guna meningkatkan derajat kemuliaan manusia yang tinggi.”* Pendiri sekolah ini yakin akan semua hak pendidikan anak itu sama dan tidak

pendidikan, anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas memiliki hak yang berbeda dengan anak normal pada umumnya, seperti dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi:

“Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Selain dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak pendidikan anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas juga dijelaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, diantaranya:

1. Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: “Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - (1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - (2) Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
 - (3) Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
 - (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Pasal 43 yang terdiri dari 4 ayat yaitu:
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
 - (2) Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan pendidikan;

disini dimaksudkan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan, sehingga memungkinkan menerima hikmah.

Istilah al-tarbiyah berasal dari kata rabb, berarti pendidik. Kata rabb dalam surat al-Fâtiyah melukiskan Tuhan dengan segala sifat-Nya yang dapat menyentuh makhluk-Nya seperti pemberi rezeki, pengampunan, kasih sayang, juga amarah, ancaman, siksa, dan sebagainya. Dengan demikian, apapun bentuknya perlakuan Tuhan terhadap makhluk-Nya sama sekali tidak terlepas dari pendidikan-Nya kendatipun perlakuan-Nya menurut kacamata manusia sebagai sesuatu yang negatif. Penggunaan istilah al-tarbiyah terlalu luas, tidak hanya digunakan untuk manusia tetapi juga untuk tumbuhan, hewan dan lainnya.

Kemudian istilah al-ta'dîb dalam arti pendidikan hanya ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan al-Askari. Menurut Hasan Langgulung, kata al-ta'dîb memiliki fungsi dan arti yang lebih tepat digunakan bagi pendidikan, karena kata ini lebih khusus ditekankan pada pembinaan manusia.

Ilmu menurut bahasa adalah petunjuk/hukum/ketetapan yang pasti dan datangnya dari Allah. Adapun ilmu menurut istilah sebagaimana dijelaskan beberapa ahli ilmu (ulama) adalah semua petunjuk / aturan / ketetapan kodrat alamiah yang memiliki dalil / sandaran / teori yang telah ditetapkan oleh Allah pada makhluk-Nya. Pengetahuan adalah ilmu yang telah sampai kepada manusia yang diperoleh melalui penelaan dan pendalaman fenomena alam.

tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif semakin nyata. Implikasi dari adanya statement ini mengikat kepada seluruh anggota konferensi supaya semua anak tanpa terkecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan yang sama dan memadai.

Setelah adanya Deklarasi Bangkok, kemudian ditindak lanjuti pada 1994 dengan menyelenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang kemudian dikenal dengan *the Salamanca statement on inclusive education*. Kemudian pada tahun 2004 sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia mengenai pendidikan inklusif, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.

Perjuangan dalam memenuhi hak-hak anak yang memiliki hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan menghasilkan *Rekomendasi Bukittinggi* yang berisi penekanan atas perlunya mengembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara yang dapat menjamin bahwa semua anak benar-benar telah memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan juga layak.

Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif, sesuai dengan perkembangan pendidikan inklusif di berbagai belahan dunia. Pada

Para pendiri negeri ini sebenarnya telah memikirkan pendidikan di negeri ini sejak jauh-jauh hari yang lalu. Kenyataan ini tertuang jelas ketika hakikat dan cita-cita bangsa dirumuskan dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945, yang berbunyi “... membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,....”.

Adapun pandangan layanan pendidikan bagi para penyandang cacat adalah layanan pendidikan yang menggunakan pendekatan humanis. Pendekatan humanis ini sangat menghargai manusia sebagai manusia yang sama dan memiliki kesempatan yang sama besarnya dengan manusia lainnya dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan sebuah wadah ideal yang diharapkan dapat mengakomodasi pendidikan bagi semua, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Karena selama ini, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus masih belum terpenuhi haknya dalam memperoleh pendidikan layaknya anak-anak lainnya.

Tanggung jawab penuntasan wajib belajar bagi anak berkebutuhan khusus dalam menerima pendidikan telah menjadi kepedulian dari berbagai pihak sehingga dapat membantu anak-anak tersebut dalam mengakses pendidikan melalui “belajar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang inklusif”.

- a) Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk semua adalah benar-benar untuk semua.
- b) Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program perkembangan usia dini anak, pra sekolah dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi.
- c) Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

Disamping itu juga menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya:

- a) Inklusi seyogyanya dipandang sebagai sebuah prinsip fundamental yang mendasari semua kebijakan nasional.
- b) Konsep kualitas seyogyanya difokuskan baik pada perkembangan nasional, emosional dan fisik, maupun pencapaian akademik lainnya.

- c) Sistem asesmen dan evaluasi nasional perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip non diskriminasi dan inklusi serta konsep kualitas sebagaimana telah disebutkan diatas.
- d) Orang dewasa seyogyanya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang perbedaan karakteristik maupun keadaan individu, serta seharusnya pula memperhatikan pandangan mereka.
- e) Semua kementerian seyogyanya berkoordinasi untuk mengembangkan strategi bersama menuju inklusi.
- f) Demi menjamin pendidikan untuk semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap anak, maka masalah non diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, donor, masyarakat, berbagai kelompok local, orang tua, anak maupun sektor swasta.
- g) Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi non pemerintah, seyogyanya berkolaborasi dan berkoordinasi dalam setiap upaya mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak.

- 1) Menjadikan orang tua atau keluarga yang lebih mengetahui sistem belajar di sekolah.
- 2) Meningkatkan kepercayaan orang tua atau keluarga terhadap guru dan sekolah.
- 3) Memiliki tanggung jawab kuat terhadap pendidikan anak di rumah dan sekolah.
- 4) Orang tua atau keluarga akan lebih mengetahui dan mengikuti perkembangan pembelajaran anak.
- 5) Orang tua dan keluarga akan semakin terbuka dan ramah dalam bekerja sama dengan guru terkait perkembangan pembelajaran anak.
- 6) Memudahkan orang tua dan keluarga dalam mengajak anak ke sekolah untuk belajar.
- 7) Mengharuskan seluruh anggota keluarga sama-sama belajar untuk mempelajari lebih lanjut tentang perkembangan anak.
- 8) Seluruh anggota keluarga akan merasa senang melihat anak-anak mereka yang memiliki kebutuham khusus mampu berteman dengan kelompok anak-anak yang beragam.
- 9) Seluruh anggota keluarga mempunyai kesempatan masing-masing dalam mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang keberagaman dan perbedaan-perbedaan individual.
- 10) Seluruh anggota keluarga akan memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengan orang tua yang lainnya, mereka akan

satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Penerapan dari tujuan ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, bahkan pendidikan dasar sembilan tahun menjadi satu kewajiban bagi setiap warganya. Dengan demikian, pendidikan merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara yang harus diimplementasikan tanpa adanya diskriminasi.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, pastilah banyak kendala-kendala yang ditemui. Keragaman rakyat Indonesia menjadi salah satu faktor dalam pelaksanaan tujuan negara tersebut. Meski demikian, apapun kendalanya pendidikan harus tetap dilaksanakan dan diterima oleh semua warga negara tanpa terkecuali, meskipun kepada anak berkebutuhan khusus.

Atas nama seluruh warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan hak, derajat, harkat, dan martabat, maka pendidikan untuk semua harus tetap dilaksanakan kapanpun dimanapun tanpa mengecualikan anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam keikutsertaannya dalam program pendidikan.

Untuk menyamartakan hak pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia, maka penyelenggaraan sekolah inklusi menjadi sangat relevan. Sesuai dengan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki

bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil, sembari disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didiknya.

Dalam hal memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif Galuh Handayani sudah cukup maksimal. Sekolah ini menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya, baik peserta didik reguler maupun peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus melalui penyesuaian kurikulum, strategi/metode pembelajaran, pendampingan pengajaran, penilaian, dan penyiapan sarana prasarananya.

Selain dalam hal pendidikan, sekolah Galuh Handayani juga berfokus pada kepribadian peserta didiknya. Diketahui bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus pastilah mengalami hambatan dalam belajar, karena kesulitannya mencerna dan memahami materi pelajaran secara normal. Oleh karena keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus itu menjadikan para orang tua itu (anak berkebutuhan khusus) tidak memiliki harapan banyak kepada anaknya selain mampu hidup mandiri seperti anak normal lainnya.

Proses belajar mengajar yang sudah menjadi kewajiban dalam sekolah juga dilakukan di sekolah ini. Berhubung sekolah ini merupakan sekolah inklusi dengan keadaan peserta didik yang beragam, tentulah ada perbedaan antara sekolah reguler dengan sekolah ini. Dalam hal

pengajaran sekolah ini dilengkapi 2 orang guru dalam satu ruangan, satu bertugas sebagai guru utama yang menyampaikan materi secara umum di depan kelas, dan yang satunya merupakan guru pendamping dalam mengawasi peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus.

Proses pembelajaran yang ada di sekolah ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu in door dan out door. Proses pembelajaran di dalam kelas dilakukan sama dengan yang dilakukan sekolah pada umumnya. Hanya saja, menurut Bu Ana, selaku Wakil Kepala Sekolah penyampaian materi saja tak cukup dalam proses pembelajaran untuk mencapai tingkat pemahaman siswa. Selain penyampaian materi, maka dibutuhkan juga praktek atau penyampaian materi menggunakan bantuan alat praga. Menurutnya, tingkat imajinasi anak itu berbeda-beda, dan anak berkebutuhan khusus termasuk anak yang paling lambat. Untuk menggiring anak berkebutuhan khusus agar cepat dalam memahami materi pembelajaran, maka dibantu menggunakan alat praga atau langsung dipraktikkan.

Selain dengan bantuan alat praga dan praktek, upaya pemenuhan hak pendidikan kepada peserta didiknya juga dilakukan di luar ruangan untuk mengurangi tingkat kejenuhan dalam belajar. Belajar sambil bermain di luar ruangan merupakan salah satu cara menarik minat anak-anak itu untuk belajar. Sebagai sekolah inklusi yang menangani banyak anak berkebutuhan khusus, sekolah ini tak hanya menyediakan sarana prasarana dalam kegiatan belajar mengajar saja, tetapi juga menyediakan terapi khusus untuk anak dan orang tua.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh sekolah dan program-program yang diadakan serta fasilitas yang disediakan, sekolah Galuh Handayani Surabaya sudah cukup maksimal dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya.

Islam sangat mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahkan ia mendorong pemeluknya untuk mencari ilmu pengetahuan kapan dan dimana pun. Islam juga menempatkan pakar ilmu pengetahuan pada peringkat yang tinggi (al-Baqarah/2:31-32; Fâthir/35:28; al-Zumar/39:9; al-Mujâdalah/58:11 dan al-‘Alaq/96:1-5).

Islam adalah agama ilmu pengetahuan, ia sangat serasi dengan sifat dasar manusia. Manusia diciptakan Allah dinamis dan berilmu pengetahuan. Dalam Islam keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat.

Pembahasan ini merupakan inti dari isi skripsi yang menjadi pembahasan penting. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”. Selain

dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak pendidikan anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas juga dijelaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu: Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: “Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

Kedua pasal dalam dua undang-undang yang berbeda sama-sama menjelaskan tentang hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam dua undang-undang itu dijelaskan ada dua metode pembelajaran, yaitu: yang pertama pendidikan luar biasa (inklusif) dan yang kedua pendidikan khusus.

Untuk kedua metode pembelajaran diatas, selanjutnya dijelaskan dalam peraturan dan undang-undang lain.

1. Pendidikan Inklusif dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang Konsep Pendidikan Inklusif, yang berbunyi “Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”

2. Sementara untuk pendidikan khusus dijelaskan dalam Undnag-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 5 ayat 2: “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.” Dan pengertian pendidikan khusus selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 32 ayat 1: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

Dari pemaparan beberapa undang-undang dan peraturan diatas mengenai hak pendidikan anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari dua bentuk pembelajaran, yakni secara inklusif (luar biasa) dan khusus, tidak ada perbedaan mengenai dua bentuk pembelajara tersebut. Baik pendidikan inklusif maupun khusus sama-sama ditujukan kepada anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Selanjutnya untuk penerapannya dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif Galuh Handayani Surabaya sudah cukup maksimal dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang sekolah inklusi dalam melaksanakan tugasnya sebagai sekolah inklusif.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan: “lingkup standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Sekolah Galuh Handayani dalam mengimplementasikan pasal tersebut juga sudah cukup maksimal dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Mulai dari kurikulum yang mengikuti kurikulum nasional dengan sedikit modifikasi untuk menyesuaikan dengan keadaan siswa, proses pengajaran dan pendampingan siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara penuh, tenaga pendidik yang sudah sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing, sarana dan prasarana yang sudah mendukung dengan keberadaan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus (ditambah beberapa fasilitas yang khusus diadakan untuk siswa berkebutuhan khusus), pengelolaan dan pembiayaan yang juga menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan dari keluarga anak berkebutuhan khusus itu, serta penilaian yang objektif sesuai dengan kemampuan dan kelebihan peserta didik.

Pengelompokan yang dilakukan pihak sekolah kepada para peserta didiknya bukanlah satu bentuk ketidakadilan, namun justru satu langkah lebih baik dalam menganggap keberadaan dan menghargai batas kemampuan masing-masing siswanya. Cara ini juga berhasil dalam

